



UNIVERSITAS ISLAM MADURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat: Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324 321783 Pamekasan 69351
 Website : <http://www.fhuim.ac.id> e-mail : fhuimadura@gmail.com

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Hukum Tata Negara	MKN003	4 SKS	2	4 Pebruari 2023
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS		Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas	
	 Aminullah, SH., M.H		 Ach. Khoiri, M.Pd	
			 Hanafi, S.H., M.H	

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	CPSA	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
	CPSB	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	CPKKA	Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif
	CPKKB	Memiliki pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi
	CPKUA	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya
	CPKUB	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	
	CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup HTN
	CPMK2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber HTN
CPMK3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas HTN	
CPMK4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia	

	CPMK5	Mahasiswa Mampu menjelaskan tentang kewarganegaraan
	CPMK6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga Megara menurut UUD 1945
	CPMK7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga-lembaga independen
	CPMK8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan demokrasi Indonesia
	CPMK9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-Asa Pemerintahan Daerah
	CPMK10	Mahasiswa mampu dan memahami dan menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
	CPMK11	Mahasiswa Mampu menjelaskan Hak Asasi Manusia
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, hirarki perundang-undangan di Indonesia, sejarah dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, Asas-asas hukum tata negara Indonesia, Lembaga-lembaga Negara sebelum dan setelah perubahan UUD 1945, Lembaga negara Non Kementerian, Kewarganegaraan, Sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, Pemerintahan Daerah, dan Hak Asasi Manusia.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<p>Pertemuan 1 : Pendahuluan : A. lingkup kajian HTN. B, Pengertian HTN dan hubungannya dengan HAN. C, Hubungan HTN dengan Ilmu Negara dan Ilmu Politik</p> <p>Pertemuan 2 & 3 : Sumber-sumber Hukum Tata Negara: A. pengertian sumber hukum, B. macam-macam sumber hukum, C. sumber hukum tata negara, D. Hierarki Peraturan Perundang-undangan RI, E. hierarki menurut UU no 10 Tahun 2004. F. hierarki menurut UU No 12 Tahun 2011</p> <p>Pertemuan 4 & 5 : Asas-asas Hukum Tata Negara: A. Pengertian Asas-Asas HTN, B. asas-asas HTN. 1. Asas Pancasila, 2. Asas Negara Hukum, 3. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, 4. Asas negara kesatuan, 5. Asas pemisahan kekuasaan dan <i>check and balances</i></p> <p>Pertemuan 6 : Sejarah Ketatanegaraan Indonesia: A. Perubahan Sistem pemerintahan Negara, B. Perkembangan Konstitusi di Indonesia, C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, D. Reformasi dan Perubahan UUD 1945</p> <p>Pertemuan 7 : Kewarganegaraan di Indonesia</p> <p>Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)</p> <p>Pertemuan 9 & 10 : Lembaga-lembaga Negara: A. Perkembangan Ketatanegaraan, B. Lembaga-Lembaga Negara 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Badan Pemeriksa Keuangan, 8. Komisi Yudisial.</p> <p>Pertemuan 11 : Lembaga-Lembaga Independen: A. perkembangan lembaga-lembaga independen, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Nasional HAM, D. Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara,</p> <p>Pertemuan 12 : Demokrasi di Indonesia: A. Konsepsi Demokrasi, B. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia. C. Sistem dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia.</p> <p>Pertemuan 13 : Asas-Asas Pemerintahan Daerah: A. Asas Desentralisasi, B. Asas Dekonsentrasi, C. Asas Tugas Pembantuan</p> <p>Pertemuan 14 & 15 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: A. Dasar, Kedudukan Dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. C. Praktek</p>	

	Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia D. Kriteria Kegentingan yang Memaksa Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)	
Daftar Referensi	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Huda, Ni'Matul, Hukum Tata Negara (edisi revisi), 2005 2. Soematri, Sri, Prof. Dr. HRT., Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, 2020 <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Asshiddiqie, Jimly, Prof. DR., Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Bhuanallmu Populer. 4. Mahfud, MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi). 2001 5. UUD Republik Indonesia Tahun 1945 6. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras :
	Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Nama Dosen Pengampu	Aminullah, SH., M.H NIDN. 0718098504	
Mata kuliah prasyarat (Jika ada)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia 3. Ilmu Negara 	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup HTN	Ruang lingkup HTN, Pendahuluan : A. lingkup kajian HTN. B. Pengertian HTN dan hubungannya dengan HAN C. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara dan Ilmu Politik	Ceramah dan diskusi	TM: 4x50 menit	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan materi tentang ruang lingkup HTN	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Aktif diskusi di dalam kelas	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan ruang Lingkup Hukum Tata Negara	5%
2-3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber HTN	Sumber-sumber Hukum Tata Negara: A. Pengertian sumber hukum, B. Macam-macam sumber hukum, C. Sumber hukum tata negara, D. Hierarki Peraturan Perundang- undangan RI, E. Hierarki menurut UU no 10 Tahun 2004. F. Hierarki menurut UU No 12 Tahun 2011.	Ceramah dan diskusi	TM: 4x50 menit	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang hasil sumber- sumber HTN	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Aktif diskusi di dalam kelas	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan Istilah yang berkaitan sumber-sumber HTN	10%
4-5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas HTN	Asas-asas Hukum Tata Negara: A. Pengertian Asas-Asas HTN, B. Asas-asas HTN. a) Asas Pancasila, b) Asas Negara Hukum, c) Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi,	Ceramah dan diskusi	TM: 4x50 menit	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang asas-asas HTN	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Aktif presentasi dan diskusi di dalam kelas	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan materi tentang asas-asas HTN	10%

		d) Asas negara kesatuan, e) Asas pemisahan kekuasaan dan <i>check and balances</i>						
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia	Sejarah Ketatanegaraan Indonesia: A. Perubahan Sistem pemerintahan Negara, B. Perkembangan Konstitusi di Indonesia, C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, D. Reformasi dan Perubahan UUD 1945	Ceramah dan diskusi,	TM: 4x50 menit	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang sejarah Ketatanegaraan Indonesia	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Makalah • Presentasi • Diskusi	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan tentang istilah sejarah ketatanegaraan Indonesia	10%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Kewarganegaraan Indonesia	Kewarganegaraan Indonesia	Ceramah dan diskusi,	TM: 4x50 menit	Mahasiswa mendiskusikan prinsip kewarganegaraan Indonesia	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Aktif diskusi di dalam kelas	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan tentang kewarganegaraan Indonesia	5%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9-10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga Negara menurut UUD 1945	Lembaga-lembaga Negara: A. Perkembangan Ketatanegaraan, B. Lembaga-Lembaga Negara: a) Majelis Permusyawaratan Rakyat, b) Dewan Perwakilan rakyat, c) Dewan Perwakilan	Ceramah diskusi, dan studi kasus	TM: 4x50 menit	Mahasiswa mendiskusikan tentang lembaga negara menurut UUD 1945	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Aktif diskusi di dalam kelas	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan tentang lembaga negara menurut UUD 1945	15%

		Daerah, d) Presiden dan Wakil Presiden, e) Mahkamah Agung, f) Mahkamah Konstitusi, g) Badan Pemeriksa Keuangan, h) Komisi Yudisial.						
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lembaga-lembaga independen	Lembaga-Lembaga Independen: A. Perkembangan lembaga-lembaga independen, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Nasional HAM, D. Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara,	Ceramah dan diskusi	TM: 4x50 menit	Mahasiswa mendiskusikan tentang lembaga-lembaga independen	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi di dalam kelas	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan tentang lembaga independen	10%
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan demokrasi Indonesia	Demokrasi di Indonesia: A. Konsepsi Demokrasi, B. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia. C. Sistem dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia	Ceramah diskusi, dan bedah kasus	TM: 4x50 menit	Diskusi dan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Aktif diskusi di dalam kelas	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan tentang Demokrasi Indonesia	10%
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-Asas Pemerintahan Daerah	Asas-Asas Pemerintahan Daerah: A. Asas Desentralisasi, B. Asas Dekonsentrasi, C. Asas Tugas Pembantuan	Ceramah dan diskusi	TM: 4x50 menit	Mahasiswa mendiskusikan tentang Asas-Asas Pemerintahan Daerah	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Aktif diskusi di dalam kelas	Ketepatan menjelaskan dan penguasaan tentang Asas-asas Pemerintah Daerah	10%
14-15	Mahasiswa mampu	Peraturan Pemerintah	Ceramah dan	TM: 4x50	Mahasiswa	Kriteri	Ketepatan	15%

	memahami dan menjelaskan urgensi Pepru dalam HTN	Pengganti Undang-Undang: A. Dasar, Kedudukan Dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. C. Praktek Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia D. Kriteria Kegentingan yang memaksa	diskusi	menit	mempelajaritentang urgensi perpu dalam HTN	Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: • Aktif diskusi di dalam kelas	menjelaskan dan penguasaan tentang Perpu dalam urgensi HTN	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							